



LAPORAN KINERJA
(LKj)
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus
TA. 2026

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus mempunyai tugas dan kedudukan strategis dalam melaksanakan RPJMD tahun 2025 – 2029 didasarkan pada tujuan dan sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Tugas Dinas Kesehatan dalam melaksanakan RPJMD dimuat pada Misi pertama *Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat*, dengan tujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat di Kabupaten Tanggamus

Berdasarkan misi pertama maka tujuan yang ingin dicapai yaitu *meningkatkan kualitas hidup masyarakat*, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran strategis yang ingin dicapai setiap tahun untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu Meningkatnya derajat kesehatan.

Dinas kesehatan Kabupaten Tanggamus telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2025 sesuai rencana strategis 2025-2029. Dari 2 sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan 9 indikator kinerja utama (IKU). Hasil pengukuran indikator kinerja untuk menilai capaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	89.98	112,90	44.11%	Rendah
		Angka Kematian Balita (AKB) per 1.000 KH	3.46	6.36	-80.51%	Sangat Rendah
		Prevalensi Balita Stunting	22.2	-	-	Tidak ada Survey
		Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification	59.94	67,02	111.81%	Melampaui Target

		Rate (CNR)				
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	94.41	95.00	100.63%	Melampau Target
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	98.40	98	99.58%	Sangat Tinggi
		Cakupan Kepesertaan JKN	80.2	78.8	98.28%	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	88.12	87.04	98.77%	Sangat Tinggi
		Rasio Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan per-satuan Penduduk	1.81	1.90	104.74%	Melampau Target

Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan laporan kinerja ini

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	>100	Melampau Target	Biru
2.	$\geq 91-100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
3.	75,1 – 90,0	Tinggi	Hijau Muda

4.	65,1 – 75,0	Sedang	Kuning Tua
5.	50,1 – 65,0	Rendah	Kuning Muda
6.	≤ 50,0	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010, diolah

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis dengan realisasi anggaran sebesar Rp.78.062.160.391 Atau 49,27 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 158.435.474.266,66 dari 9 indikator sasaran strategis, terdapat 1 indikator yang capaiannya termasuk kategori Sangat Rendah sehingga masih perlu ditingkatkan yaitu Angka Kematian Balita . Upaya untuk meningkatkan capaian indikator tersebut adalah melalui :

- Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil (*Ante Natal Care/ ANC* terpadu-10T) dengan minimal 6 kali kunjungan selama hamil dan wajib dilakukan pemeriksaan USG oleh dokter pada trimester pertama dan trimenster terakhir sebagai upaya deteksi dini komplikasi pada kehamilan;
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar, dimana setiap bayi baru lahir wajib dilakukan skrining Hipothyroid kongenital dan skrining Penyakit Jantung Bawaan Kritis dan dilakukan pelayanan kesehatan minimal 3 kali
- Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), manajemen penganganan asfiksia bayi baru lahir, dan penanganan kegawat daruratan bayi;
- Melaksanakan *skill assesment* pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan;
- Melakukan *Audit MaternalPerinatal* (AMP) pada kasus *near miss* dan atau kematian neonatal;

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 dapat tersusun.

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini berisi keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, serta kendala atau kekurangan yang ada. Selain itu, Laporan Kinerja ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas laporan Kinerja instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan serta Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029. Pada **Laporan Kinerja** Dinas Kesehatan ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun 2025. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2025 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2025 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Kesehatan di tahun 2026.

Tidak lupa kami ucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada Sekretaris, seluruh Kepala Bidang, Kepala Subbag, beserta staf fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Kepala UPTD Puskesmas serta Lintas sektor terkait yang telah bekerjasama dalam pengumpulan data dan penyusunan Laporan Kinerja ini.

Mudah-mudahan dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini akan diperoleh manfaat sebagai umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja di seluruh unit kerja Dinas Kesehatan di



masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.

Kota Agung, Februari 2026

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanggamus



dr. Herry Novrizal, M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19721124 200212 1 002

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	Hal. i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 GAMBARAN UMUM	3
1.3.1. KONDISI PEMERINTAHAN	3
1.3.2. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN	7
1.3.3. KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	13
1.4 SISTEM PENYAJIAN	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	17
2.1.1. VISI, MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH	17
2.1.2. ISU STRATEGIS, TUJUAN SASARAN DAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH	18
2.1.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	19
2.1.4. POHON KINERJA PERANGKAT DAERAH	28
2.2. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	29
2.1.1. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	29
2.1.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (EVALUATED)	33
2.1.3. REKOMENDASI INSPEKTORAT	35

BAB	III	AKUNTABILITAS KINERJA	37
		3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	37
		3.2 REALISASI ANGGARAN	61
		3.2.1.	62
		ALOKASI PER SASARAN	
		PROGRAM/KEGIATAN	64
		3.2.2.	
		PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA	
		DAN ANGGARAN	
BAB	IV	PENUTUP	66
		4.1 UKURAN KINERJA	66
		4.2 SIMPULAN	66
		4.3 REKOMENDASI	67

LAMPIRAN :

- LAPORAN REALISASI KEUANGAN
- PERJANJIAN KINERJA
- RKT
- RENCANA AKSI
- SOP

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 1.1	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2025	3
Tabel 1.2	Daftar nama rumah sakit di Kabupaten Tanggamus	4
Tabel 1.3	Daftar Nama Puskesmas Rawat inap dikabupaten Tanggamus	4
Tabel 1.4	Daftar Nama Puskesmas Non Rawat inap dikabupaten Tanggamus	4
Tabel 1.5	Daftar Nama Puskesmas Pembantu	5
Tabel 1.6	Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus (berdasarkan pendidikan) Tahun 2025	14
Tabel 2.1	Indikator Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus	19
Tabel 2.2	Indikator Sasaran strategis Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus	19
Tabel 2.3	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran Strategis Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus	21
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024	33
Tabel 2.5	Program Kegiatan dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024	34
Tabel 3.1	Skala Nilai Realisasi Kinerja	37
Tabel 3.2	Hasil Pencapaian Indikator Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024	38
Tabel 3.3	Perbandingan Hasil Pencapaian Indikator Strategis (Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH) Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2023– 2024	40
Tabel 3.4	Perbandingan Hasil Pencapaian Indikator Strategis (Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH) Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2023– 2024	42
Tabel 3.5	Perbandingan Hasil Pencapaian Indikator Strategis (Prevalensi balita stunting) Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2023– 2024	44
Tabel 3.6	Perbandingan Hasil Pencapaian Indikator Strategis (Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR)) Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2023 - 2024	46
Tabel 3.7	Perbandingan Hasil Pencapaian Indikator Strategis (Angka Keberhasilan pengobatan TB/Case Notification Rate (CNR)) Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2024 - 2025	48
Tabel 3.8	Perbandingan Hasil Pencapaian Indikator Strategis (Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan) Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2023 – 2024	50
Tabel 3.9	Perbandingan Hasil Pencapaian Indikator Strategis (Cakupan kepesertaan aktif JKN) Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2024 - 2025	52

Tabel 3.10	Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2024- 2025	54
Tabel 3.11	Perbandingan Rasio Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan per-satuan Penduduk Tahun 2024- 2025	56
Tabel 3.12	Data Tenaga Kesehatan pada puskesmas di kabupaten Tanggamus	58
Table 3.13	Data Tenaga Kesehatan pada Rumah sakit Batin Mangunang	60
Table 3.14	Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2024	62
Table 3.15	Kinerja dibandingkan dengan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024	64

DAFTAR GRAFIK

		Hal.
Grafik 3.1	Trend angka Harapan Hidup Propinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2024	39
Grafik 3.2	Trend angka Kematian Ibu Per 100.000 KH Kab. Tanggamus Tahun 2022-2024	41
Grafik 3.3	Trend angka Kematian Balita Per 1.000 KH Kab. Tanggamus Tahun 2022-2024	43
Grafik 3.4	Prevalensi balita stunting Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2023-2024	46
Grafik 3.5	Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR))Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2024 – 2025	47
Grafik 3.6	Angka Keberhasilan pengobatan TB/Case Notification Rate (CNR)) Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2024 – 2025	49
Grafik 3.7	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan) Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2024 – 2025.	51
Grafik 3.8	Cakupan kepesertaan aktif JKN Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2024 - 2025	53
Grafik 3.9	Perbandingan Indek Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2024- 2025	55
Grafik 3.10	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan per- satuan Penduduk Tahun 2024- 2025	57

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka kesempatan yang cukup luas bagi daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang dalam penyelenggaraannya menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan. Pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 telah membawa implikasi yang luas dan serius, sehingga tidak sedikit masalah, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh daerah. Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) yang mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada pemberi amanah serta masyarakat, SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban dengan tahapan meliputi penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran organisasi tersebut. Hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus melaksanakan kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja (LKj) sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen rencana

strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus tahun 2025-2029 yang dijabarkan pencapaiannya setiap tahun yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja (PK). Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
- 2) Undang – Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Nepotisme;
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- 9) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);
- 12) Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.366/35/10/2016 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018;
- 13) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Nomor : 440/2032/25/2022 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2013-2018;
- 14) Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029;

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1.3.1 KONDISI PEMERINTAHAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus memiliki jejaring guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus. Berikut adalah jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tanggamus :

Tabel 1.1
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

No	Fasilitas Kesehatan	Pemkab	Swasta	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum	1	1	2
2	Puskesmas Rawat Inap	19	0	19
3	Puskesmas Non Rawat Inap	7	0	7
4	Puskesmas Pembantu	56	0	56
5	Balai Pengobatan/Klinik	0	29	29
6	Dokter Praktek Mandiri	0	61	61
7	Apotek	0	48	48
8	Toko Obat	0	12	12

Tabel 1.2

Daftar nama rumah sakit di Kabupaten Tanggamus

No	Nama rumah sakit	status
1	Rs Batin Mangunang	Pemkab
2	Rs. Panti secanti	Swasta

Tabel 1.3

Daftar Nama Puskesmas Rawat inap dikabupaten Tanggamus

No	Nama Puskesmas	jenis Pelayanan
1	SIRING BETIK	Rawat inap
2	SUKARAJA	Rawat inap
3	SANGGI	Rawat inap
4	WAY NIPAH	Rawat inap
5	PULAU PANGGUNG	Rawat inap
6	NGARIP	Rawat inap
7	AIR NANINGAN	Rawat inap
8	TALANG PADANG	Rawat inap
9	MARGOYOSO	Rawat inap
10	GISTING	Rawat inap
11	RANTAU TIJANG	Rawat inap
12	SUMANDA	Rawat inap
13	BULOK SUKAMARA	Rawat inap
14	PUTIH DOH	Rawat inap
15	KLUMBAYAN	Rawat inap
16	ANTAR BRAK	Rawat inap
17	KLUMBAYAN BARAT	Rawat inap
18	MARTANDA	Rawat inap
19	GUNUNG SARI	Rawat inap

Tabel 1.4

Daftar Nama Puskesmas Non Rawat inap dikabupaten Tanggamus

No	Nama Puskesmas	Jenis Pelayanan
1	WONOSOBO	Non rawat inap
2	SUDIMORO	Non rawat inap
3	PASAR SIMPANG	Non rawat inap
4	NEGARA BATIN	Non rawat inap
5	SUMBERREJO	Non rawat inap

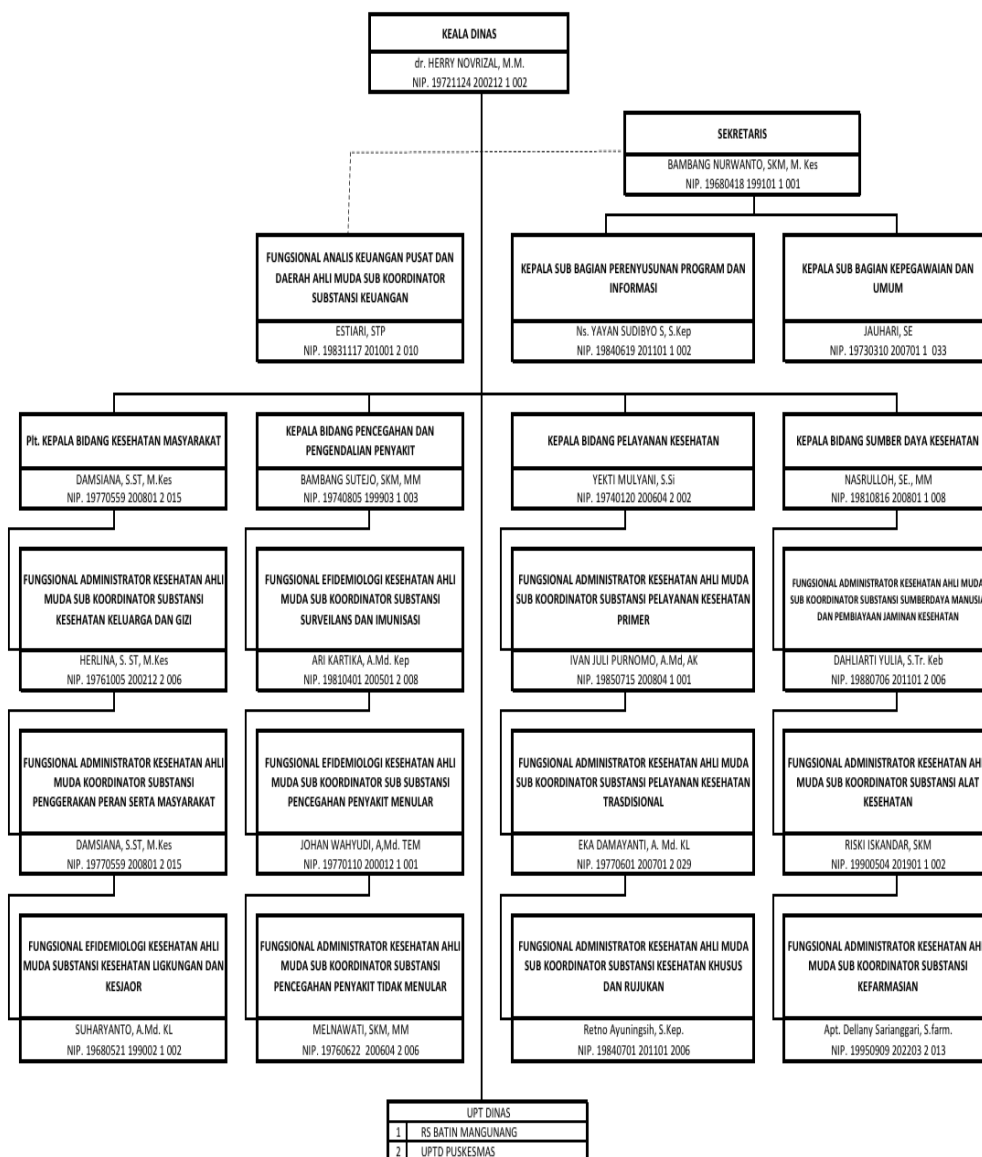
6	KEDALOMAN	Non rawat inap
7	KOTA AGUNG	Non rawat inap

Tabel 1.5

Daftar Nama Puskesmas Pembantu

No	Nama Puskesmas	Jumlah
1	SIRING BETIK	1
2	WONOSOBO	1
3	SUDIMORO	2
4	SUKARAJA	2
5	SANGGI	2
6	KOTA AGUNG	1
7	WAY NIPAH	0
8	PASAR SIMPANG	1
9	NEGARA BATIN	1
10	PULAU PANGGUNG	3
11	NGARIP	3
12	AIR NANINGAN	4
13	TALANG PADANG	2
14	MARGOYOSO	0
15	SUMBERREJO	2
16	GISTING	2
17	KEDALOMAN	2
18	RANTAU TIJANG	4
19	SUMANDA	1
20	BULOK SUKAMARA	4
21	PUTIH DOH	5
22	KLUMBAYAN	3
23	ANTAR BRAK	3
24	KLUMBAYAN BARAT	2
25	MARTANDA	3
26	GUNUNG SARI	2
Total		56

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus terhitung tanggal 26 Januari 2026 dipimpin oleh dr.Herry Novrizal, M.M. yang sebelumnya dipimpin oleh Bapak Bambang Nurwanto, S.KM. M.Kes. selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Dinas dibantu oleh pejabat-pejabat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 44 Tahun 2016 dengan struktur organisasi seperti dibawah ini :



Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus merupakan organisasi perangkat daerah bertipe “A” dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi
 - b) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Kesehatan Masyarakat,
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
5. Bidang Pelayanan Kesehatan,
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan,

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 - a) 26 Puskesmas
 - b) RSUD Batin Mangunang
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.2 TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, tugas pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten Tanggamus di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesehatan.

Uraian tugas unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan

Uraian Tugas :

- 1) Merencanakan kebijakan pembangunan dibidang kesehatan;
- 2) Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang kesehatan;
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;
- 4) Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 5) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional program kerja;
- 6) Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait maupun swasta dalam rangka pelaksanaan program dibidang kesehatan;
- 7) Menyelenggarakan penganggaran biaya program kesehatan;

- 8) Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan;
- 9) Menandatangani naskah dinas yang bersifat prinsip dan naskah dinas yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah;
- 10) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan bertanggung jawab penuh atas lembaga-lembaga kesehatan dibawahnya;
- 11) Menyelenggarakan pembinaan teknis monitoring dan evaluasi dibidang kesehatan;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

2. Sekretaris

Tugas Pokok :

Koordinasi pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan yang meliputi penyusunan program dan informasi kesehatan, keuangan dan barang milik negara, kepegawaian dan umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.

Uraian Tugas :

- 1) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan sub bagian penyusunan program dan informasi kesehatan, keuangan dan barang milik negara, kepegawaian dan umum;
- 2) Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang penyusunan program dan informasi kesehatan, keuangan dan barang milik negara, kepegawaian dan umum;
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;
- 4) Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 5) Mengkoordinir penyelenggaraan sub bagian penyusunan program dan informasi kesehatan, keuangan dan barang milik negara, kepegawaian dan umum;
- 6) Membina dan membimbing staf sub bagian penyusunan program dan informasi kesehatan, keuangan dan barang milik negara, kepegawaian dan umum;
- 7) Menelaah, menganalisa, meneliti, mengkaji dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- 8) Menandatangani naskah dinas yang bersifat biasa dan tidak prinsip untuk instansi sederajatnya dan atau untuk instansi;

- 9) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam penyelenggaraan kegiatan sub bagian penyusunan program dan informasi kesehatan, keuangan dan barang milik negara, kepegawaian dan umum;
- 10) Memonitor dan mengendalikan penyelenggaraan sub bagian penyusunan program dan informasi kesehatan, keuangan dan barang milik negara, kepegawaian dan umum;
- 11) Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- 12) Melaporkan penyelenggaraan kegiatan sub bagian penyusunan program dan informasi kesehatan, keuangan dan barang milik negara, kepegawaian dan umum;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

2.1 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi

Tugas Pokok :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Sub Bagian penyusunan Program dan Informasi.

Uraian Tugas :

- 1) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan sub bagian penyusunan program dan informasi kesehatan;
- 2) Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam sub bagian penyusunan program dan informasi kesehatan;
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;
- 4) Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 5) Mengatur staf dalam pelaksanaan sub bagian penyusunan program dan informasi kesehatan;
- 6) Mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan program dan informasi kesehatan;
- 7) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam penyelenggaraan penyusunan program dan informasi kesehatan;
- 8) Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- 9) Melaporkan hasil kegiatan penyusunan program dan informasi kesehatan;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

2.2 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tugas Pokok :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Uraian Tugas :

- 1) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan sub bagian kepegawaian dan Umum.;
- 2) Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam sub bagian kepegawaian dan Umum.;
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;
- 4) Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 5) Mengkoordinir penyelenggaraan sub bagian kepegawaian dan Umum.;
- 6) Mengadakan koordinasi dengan lintas program yang berhubungan dengan kegiatan sub bagian kepegawaian dan Umum.;
- 7) Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- 8) Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan sub bagian kepegawaian dan Umum.;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

3. **Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat**

Tugas Pokok :

Melaksanakan Perumusan Kebijakan Operasional, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat yang meliputi kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja.

Uraian Tugas :

- 1) Merencanakan kebijakan teknis dibidang kesehatan masyarakat;
- 2) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang kesehatan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;
- 4) Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

- 5) Mengatur dan mengendalikan teknis di bidang kesehatan masyarakat;
- 6) Membina pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat;
- 7) Melakukan pengawasan dalam kegiatan di bidang kesehatan masyarakat;
- 8) Melakukan bimbingan teknis di bidang kesehatan masyarakat;
- 9) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas bidang kesehatan masyarakat;
- 10) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang kesehatan masyarakat;
- 11) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral di bidang kesehatan masyarakat;
- 12) Melaksanakan tugas kedianasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yang meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Uraian Tugas :

- 1) Merencanakan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit ;
- 2) Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;
- 4) Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 5) Menyusun petunjuk teknis tentang pelaksanaan program kerja pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 6) Melaksanakan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 7) Melaksanakan pengawasan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 8) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral di bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit;
- 9) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;

- 10) Menyusun dan melaporkan hasil kerja pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan

5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Matra, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Uraian Tugas :

- 1) Merencanakan kegiatan pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Matra, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- 2) Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Matra, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;
- 4) Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 5) Menyusun petunjuk teknis tentang pelaksanaan pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Matra, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- 6) Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Matra, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- 7) Melaksanakan pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Matra, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- 8) Membuat laporan tentang hasil kegiatan-kegiatan seksi pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Matra, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional dalam rangka melaksanakan masing-masing program;
- 9) Merencanakan, mengatur, mengendalikan registrasi dan perizinan sarana pelayanan kesehatan swasta dan praktik tenaga kesehatan;
- 10) Melakukan pengawasan dan pembinaan sarana pelayanan kesehatan swasta dan praktik tenaga kesehatan;

- 11) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas bidang pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Matra, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- 12) Menyusun dan melaporkan hasil kerja pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan yang meliputi kefarmasian, makanan, minuman, alat kesehatan dan sumber daya manusia dan pembiayaan jaminan kesehatan.

Uraian Tugas :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang sumber daya kesehatan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sumber daya kesehatan;
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang sumber daya kesehatan;
- 4) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang sumber daya kesehatan;
- 5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang sumber daya kesehatan;
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bidang sumber daya kesehatan;
- 7) Menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang bidang sumber daya kesehatan ;
- 8) Memantau, Mengevaluasi, dan Melaporkan Pelaksanaan Kebijakan Operasional di Bidang bidang sumber daya kesehatan;
- 9) Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di Perintahkan oleh Atasan

1.3.3 KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA

Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tanggamus terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan. Adapun keadaan sumber daya kesehatan di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Ketenagaan

Sumber daya manusia penyelenggara urusan kesehatan yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus beserta Unit Pelaksana Teknis Dinas (26 Puskesmas dan 1 RSUD) adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus (berdasarkan pendidikan)
Tahun 2025

No	Jenis Ketenagaan	Dinas Kesehatan	UPT Dinas (RSUD + Pkm)	Total
A	Tenaga PNS	65	829	894
1	Dokter Spesialis		12	12
2	Dokter Umum		46	46
No	Jenis Ketenagaan	Dinas Kesehatan	UPT Dinas (RSUD + Pkm)	Total
3	Dokter Gigi		4	4
4	Perawat	12	254	268
5	Bidan	9	339	348
6	Apoteker	2	20	22
7	Kesehatan Masyarakat	7	17	24
8	Sanitarian	5	21	26
9	Gizi	4	30	34
10	Fisioterapi	0	2	2
11	Perawat Gigi	0	16	16
12	Asisten Apoteker	4	23	27
13	Analisis Kesehatan	1	18	19
14	Radiologi		3	3
15	S2 Umum	8	7	15
16	S1 Umum	6	8	14
17	D3 Umum	2	1	3
18	SLTA	3	8	11
B	Tenaga Kontrak (PTT & TKS)	27	652	679
1	Dokter Spesialis		6	6
2	Dokter Umum		2	2
4	Perawat	7	182	189
5	Bidan	2	211	213

6	Apoteker	0	1	1
7	Kesehatan Masy	1	3	4
8	Sanitarian	0	0	0
9	Gizi	2	1	3
11	Perawat Gigi	0	1	1
12	Asisten Apoteker	2	5	7
13	Analisis Kesehatan	1	5	6
14	Radiologi	0	0	0
15	S1 Umum	4	37	41
16	D3 Umum	0	18	18
17	SLTA	7	149	156
18	SMP	0	20	20
19	SD	1	11	12
	Total Tenaga (A+B)	92	652	744

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus

1.4 SISTEM PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 LANDASAN HUKUM
- 1.3 GAMBARAN UMUM
 - 13.1. KONDISI PEMERINTAHAN
 - 13.2. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN
 - 13.3. KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA
- 1.4 SISTEM PENYAJIAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
 - 2.1.1. VISI, MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1.2. ISU STRATEGIS, TUJUAN SASARAN DAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
 - 2.1.4. POHON KINERJA PERANGKAT DAERAH
- 2.2. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
 - 2.2.1. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021
 - 2.2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (EVALUATED)
 - 2.2.3. REKOMENDASI INSPEKTORAT

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- 3.2 REALISASI ANGGARAN
 - 3.2.1. ALOKASI PER SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
 - 3.2.2. PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

- 4.1 UKURAN KINERJA
- 4.2 SIMPULAN
- 4.3 REKOMENDASI

LAMPIRAN

- A. LAPORAN REALISASI KEUANGAN
- B. PERJANJIAN KINERJA
- C. RKT
- D. RENCANA AKSI
- E. SOP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

2.1.1. VISI, MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH

A. VISI

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Kabupaten Tanggamus menetapkan visi

“Bersama Tanggamus Maju Menuju Indonesia Emas”.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut maka disusun 5 (Lima) misi panca cita yaitu :

- 1) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
- 2) Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal yang berdaya saing
- 3) Memastikan Pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota.
- 4) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- 5) Mewujudkan lingkungan yang aman dan Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus sebagai salah satu organisasi perangkat daerah mengemban misi ke 1 yaitu ***Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat*** , khususnya mewujudkan sumber daya manusia yang sehat di Kabupaten Tanggamus.

C. SASARAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RPD Kabupaten Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat penjabaran dari visi dan misi RPJMD serta arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Renstra-PD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai landasan atau pedoman pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD dan

penentuan pilihan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah setiap tahunnya serta digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

2.1.2. ISU STRATEGIS, TUJUAN SASARAN DAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Masalah kesehatan merupakan masalah yang sangat kompleks sehingga untuk mengkaji masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Tanggamus harus ditinjau dari semua aspek baik internal maupun eksternal yang dapat memberikan pengaruh positif dan negatif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Tanggamus. Pada wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus masih terdapat permasalahan yang akan menjadi isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. Masih adanya 9 Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2024 dan Masih adanya 38 Kasus Kematian Balita di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2024. Kemudian terkait Stunting, pada tahun 2024 yang meningkat menjadi 24,9% Masih ada kesenjangan kasus tb baru dengan kategori sembuh atau lengkap, Kebersertaan Peserta BPJS Kabupaten Tanggamus Sebesar 98,2 % pada Tahun 2024, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan masih rendah, dan Sebaran Tenaga medis dan tenaga kesehatan belum merata, baru 3 puskesmas dari 26 puskesmas yang memiliki kategori ketenagaan lengkap

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) yang tertuang dalam program dan kegiatan sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, disamping itu sangat ditentukan pula oleh penentuan indikator kinerja. Karena merupakan suatu target, bila suatu indikator kinerja sudah ditetapkan, maka target tersebut harus sungguh-sungguh diupayakan pencapaiannya. Berikut ini Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025:

Tabel 2.1
Indikator Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target
1	Meningkatan Derajat Kesehatan	Persentase Peningkatan Angka Harapan Hidup	%	0,4

2.1.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Sasaran Strategis Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	81.92	80.63	70.54	70.04	69.30
		Angka Kematian Balita (AKB) per 1.000 KH	3.46	3.40	3.35	3.33	3.29
		Prevalensi Balita Stunting	22.2	21.62	20.77	20.3	19.83
		Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR)	59.94	65.00	69.99	74.99	79.99
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	98.5	98.8	99.1	99.4	99.7
		Cakupan kepesertaan aktif JKN	80.2	80.4	80.6	80.8	90.0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	88.19	88.37	88.54	88.72	88.9

		Rasio Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan per- satuan Penduduk	1.81	1.82	1.83	1.84	1.85
--	--	--	------	------	------	------	------



Tabel 2.3
Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran Strategis Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Uraian Data Yang Dibutuhkan	Satuan	Kertas Kerja Penentuan Target						Capaian 2025
	Perbaikan			Target						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)		Angka	81,92	80,63	70,54	70,04	69,30	68,79	112,90
		Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun (*100.000) /		9	9	8	8	8	8	11
		Jumlah kelahiran hidup diwilayah tersebut pada kurun waktu yang sama		10986	11162	11340	11422	11544	11629	9743
	Angka Kematian Balita (AKB)		Angka	3,46	3,40	3,35	3,33	3,29	3,18	6,36
		Jumlah kematian balita (Pada umur 0-4 Tahun (0-59 Bulan)) pada 1 tahun tertentu (*1000) /		38	38	38	38	38	37	62



Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025

		Jumlah kelahiran hidup diwilayah tersebut pada kurun waktu yang sama		10986	11162	11340	11422	11544	11629	9743
	Prevalensi Balita Stunting		%	22,2	21,62	20,77	20,3	19,83	19,36	3,19
		Jumlah balita pendek dan sangat pendek pada 1 tahun tertentu *atau hasil pendataan Survey Stunting /		12100	12385	12490	12800	13150	13480	1112
		Jumlah Balita diwilayah tersebut pada kurun waktu yang sama *atau hasil pendataan Survey Stunting *100		54545	57272	60136	63143	66300	69615	34848
	Angka Keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)		%	94,41	94,53	94,64	94,69	94,85	95,00	95,00
		Jumlah semua kasus TBC diobati yang memiliki hasil akhir pengobatan		878	898	918	928	939	950	1007



Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025

		sembuh dan lengkap								
		Jumlah seluruh kasus TBC yang diobati dan dilaporkan *100		930	950	970	980	990	1000	1060
	Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasik kasus TBC)		%	59,94	65,00	69,99	74,99	79,99	85,00	67,02
		jumlah kasus TB yang dilaporkan		1601	1493	1388	1319	1271	1239	1790
		Jumlah semua kasus TBC		2671	2297	1983	1759	1589	1458	2671
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan		%	98,40	98,8	99,1	99,4	99,7	100	98,0
		Jumlah Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan		628450	649700	671542	694006	716540	740373	630591
		Jumlah Seluruh Penduduk *100%		638652	657812	677546	697872	718808	740373	643524
	Cakupan kepesertaan aktif JKN		%	80,2	80,4	80,6	80,8	90,0	90,2	78,0



		Jumlah Penduduk yang memiliki BPJS Kategori Aktif		504000	522500	541000	560500	645000	668000	507212
		Jumlah Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan *100%		628450	649700	671542	694006	716540	740373	643524
	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan		Angka	88,19	88,37	88,54	88,72	88,90	89,08	87,04
		Nilai IKM Dinas Kesehatan		84,74	85,74	86,64	87,64	88,64	89,64	88,28
		Nilai IKM RSUD Batin Mangunang		83,11	84,11	85,11	86,11	87,11	88,11	81,28
		Nilai IKM Puskesmas Sanggi		89,22	89,22	89,22	89,22	89,22	89,22	87,64
		Nilai IKM Puskesmas Sukaraja		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	88,03
		Nilai IKM Puskesmas Kota Agung		91,94	91,94	91,94	91,94	91,94	91,94	88,84
		Nilai IKM Puskesmas Negara Batin		90,19	90,19	90,19	90,19	90,19	90,19	88,43
		Nilai IKM Puskesmas Pasar Simpang		87,22	87,22	87,22	87,22	87,22	87,22	90,11
		Nilai IKM Puskesmas Wonosobo		86,67	86,67	86,67	86,67	86,67	86,67	87,95



Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025

		Nilai IKM Puskesmas Gunung Sari		91,75	91,75	91,75	91,75	91,75	91,75	89,89
		Nilai IKM Puskesmas Putih Doh		91,11	91,11	91,11	91,11	91,11	91,11	82,86
		Nilai IKM Puskesmas Rantau Tijing		91,22	91,22	91,22	91,22	91,22	91,22	88,49
		Nilai IKM Puskesmas Gisting		84,22	85,22	86,22	87,22	88,22	89,22	82,32
		Nilai IKM Puskesmas Kelumbayan		86,19	86,19	86,19	86,19	86,19	86,19	87
		Nilai IKM Puskesmas Kelumbayan Barat		85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	82,01
		Nilai IKM Puskesmas Sumberejo		88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	84, 75
		Nilai IKM Puskesmas Pulau Panggung		86,67	86,67	86,67	86,67	86,67	86,67	83,79
		Nilai IKM Puskesmas Sumanda		89,47	89,47	89,47	89,47	89,47	89,47	88,42
		Nilai IKM Puskesmas Talang Padang		91,14	91,14	91,14	91,14	91,14	91,14	91,24
		Nilai IKM Puskesmas Bulok Sukamara		88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	81,64
		Nilai IKM Puskesmas Kedaloman		82,11	83,11	84,11	85,11	86,11	87,11	84,64



Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025

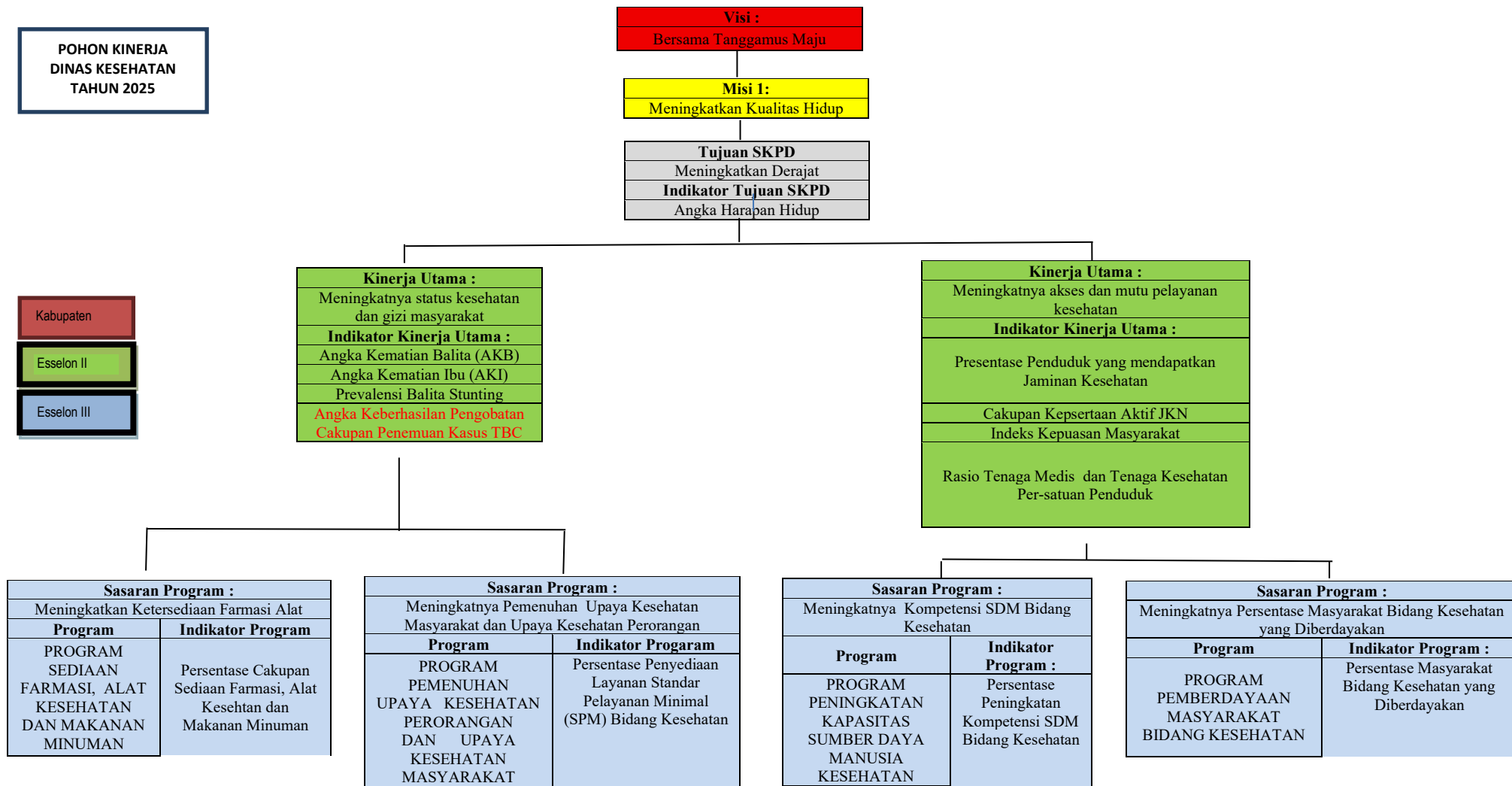
		Nilai IKM Puskesmas Ngarip		88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	84,83
		Nilai IKM Puskesmas Siring Betik		87,11	87,11	87,11	87,11	87,11	87,11	88,44
		Nilai IKM Puskesmas Way Nipah		88,94	88,94	88,94	88,94	88,94	88,94	89,27
		Nilai IKM Puskesmas Sudimoro		88,44	88,44	88,44	88,44	88,44	88,44	88,39
		Nilai IKM Puskesmas Air naningan		96,44	96,44	96,44	96,44	96,44	96,44	97,47
		Nilai IKM Puskesmas Margoyoso		91,94	91,94	91,94	91,94	91,94	91,94	87,23
		Nilai IKM Puskesmas Antar Brak		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	89,02
		Nilai IKM Puskesmas Martanda		84,99	84,99	84,99	84,99	84,99	84,99	84,67
		Jumlah Dinas, RSUD, Puskesmas		28	28	28	28	28	28	28
	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan per-satuan Penduduk		Angka	1,81	1,82	1,83	1,84	1,85	1,86	1,90
		Jumlah Tenaga Medis Dokter		52	55	58	62	64	68	55
		Jumlah Tenaga Kesehatan Bidan		659	679	689	709	719	739	693



		Jumlah Tenaga Kesehatan Perawat		445	460	490	510	550	570	472
		Jumlah Seluruh Penduduk *1000		638652	657812	677546	697872	718808	740373	643524



2.1.4. POHON KINERJA PERANGKAT DAERAH



2.2. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

i. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2025 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 15 (lima belas) prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Derajat Kesehatan.
- 2) Meningkatkan Kualitas Pendidikan
- 3) Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender.
- 4) Menurunnya Angka Pengangguran
- 5) Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat
- 6) Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan
- 7) Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam PDRB
- 8) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Wilayah
- 9) Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Energi
- 10) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah
- 11) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah
- 12) Meningkatnya Pekon Mandiri
- 13) Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- 14) Meningkatnya Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon
- 15) Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana

Dalam rangka mendukung 5 (lima belas) prioritas pembangunan Daerah maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Daerah 1: Penguatan Kualitas Manusia Melalui Pendidikan dan Kesehatan, dengan arah kebijakan yaitu:

- a) Peningkatan kesempatan pendidikan dan pengembangan keterampilan vokasional kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui Kartu Tanggamus Cerdas.
 - b) Peningkatan layanan kesehatan khususnya pada daerah yang sulit terjangkau melalui Kartu Tanggamus Sehat
 - c) Peningkatan kualitas sarpras pendidikan, revitalisasi RSUD, Puskesmas dan Pustu serta penyediaan alat kesehatan yang memadai
 - d) Pembangunan sekolah unggulan, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, peningkatan akses pendidikan tinggi serta meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan Kesehatan
 - e) Peningkatan fasilitasi pemberian Makan Bergizi Gratis dan percepatan penurunan prevalensi stunting, pembangunan pemuda dan olahraga, pengembangan seni dan budaya, penguatan literasi, pendidikan karakter dan agama, ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak
2. Prioritas Daerah 2 : Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah, dengan arah kebijakan yaitu:
- a) Peningkatan modernisasi pertanian dengan penyediaan alat dan teknologi pertanian modern serta penyediaan pupuk dan benih unggul.
 - b) Peningkatan akses pasar hasil pertanian dan perikanan melalui kemitraan dengan sektor swasta untuk pengembangan hilirisasi dan percepatan distribusi produk lokal ke pasar domestik dan internasional.
 - c) Pembangunan infrastruktur wisata, promosi pariwisata berbasis alam dan budaya lokal serta pengembangan industri kreatif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
 - d) Penyediaan kebutuhan pokok masyarakat yang terjangkau, pengembangan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan sarpras, akses permodalan, pelatihan dan pendampingan
 - e) Perluasan kesempatan kerja dan optimalisasi penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

3. Prioritas Daerah 3: Pemerataan Infrastruktur yang Berkeadilan, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a) Peningkatan dan pembangunan jalan, jembatan dan sarana pendukungnya untuk memperlancar konektivitas wilayah melalui Program TanggamusNet
 - b) Penanganan rumah tidak layak huni, penyediaan sanitasi dan air bersih yang layak.
 - c) Pemerataan jaringan Listrik dan telekomunikasi serta optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan.
 - d) Peningkatan infrastruktur irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.
 - e) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi.

4. Prioritas Daerah 4: Peningkatan Reformasi Birokras, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a) Pemberlakuan Budaya Kerja “Jalan Lurus” untuk meningkatkan efektifitas dan profesionalisme pelayanan.
 - b) Percepatan pelayanan publik yang terpadu dan peningkatan digitalisasi layanan publik melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik
 - c) Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan pemanfaatan teknologi
 - d) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan optimalisasi sistem pengaduan publik untuk bahan evaluasi pelaksanaan Pembangunan
 - e) Penerapan audit dan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah secara konsisten untuk memantau kinerja pemerintahan dan capaian program

5. Prioritas Daerah 5: Peningkatan Kamtibmas dan Pembangunan Berkelanjutan, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban umum dan pencegahan terhadap Narkoba melalui program edukasi, deteksi dini dan kerjasama semua pihak.
 - b) Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan TNI dalam menjaga keamanan di daerah perbatasan dan daerah rawan konflik.

- c) Pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba melalui program edukasi, deteksi dini dan kerjasama semua pihak
 - d) Peningkatan pemulihan lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon serta pengolahan sampah yang terpadu.
 - e) Peningkatan mitigasi bencana dan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana alam.
6. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus maka Prioritas Daerah yang berkaitan langsung adalah pada Prioritas Daerah 1: Penguatan Kualitas Manusia Melalui Pendidikan dan Kesehatan, dengan arah kebijakan yaitu:
- a) Peningkatan kesempatan pendidikan dan pengembangan keterampilan vokasional kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui Kartu Tanggamus Cerdas.
 - b) Peningkatan layanan kesehatan khususnya pada daerah yang sulit terjangkau melalui Kartu Tanggamus Sehat
 - c) Peningkatan kualitas sarpras pendidikan, revitalisasi RSUD, Puskesmas dan Pustu serta penyediaan alat kesehatan yang memadai
 - d) Pembangunan sekolah unggulan, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, peningkatan akses pendidikan tinggi serta meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan Kesehatan
 - e) Peningkatan fasilitasi pemberian Makan Bergizi Gratis dan percepatan penurunan prevalensi stunting, pembangunan pemuda dan olahraga, pengembangan seni dan budaya, penguatan literasi, pendidikan karakter dan agama, ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak

Berdasarkan hasil review dan analisis kebutuhan RKPD yang ada diperoleh dua kesimpulan, penambahan program/ kegiatan dan penghapusan program/ kegiatan. Penambahan program/ kegiatan baru yang merupakan prioritas hasil analisis kebutuhan, sedangkan penghapusan program/kegiatan dimaksud terhadap program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya yang tidak berlanjut dan/atau belum prioritas. Sesuai prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut kedalam 5 Program, 18 Kegiatan dan 73 Sub Kegiatan.

i. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (EVALUATED)

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan yang didapat dalam mencapai target kinerja. Kepala Daerah memberikan supervisi yang diperlukan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Perjanjian kinerja disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	81.92
		Angka Kematian Balita (AKB) per 1.000 KH	3.46
		Prevalensi Balita Stunting	22.2
		Angka Keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	7.00
		Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR)	59.94
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	98.5
		Cakupan kepesertaan aktif JKN	80.2
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	88.19
		Rasio Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan per- satuan Penduduk	1.81

Perumusan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tersebut di atas disesuaikan dengan Rencana Kinerja Tahun 2025. Adapun implementasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten

Tanggamus Tahun 2025-2029 terbagi dalam 5 program dan 18 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program Kegiatan dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 58.179.406.775,66
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 56.801.172.797,66
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp. 33.087.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 750.341.100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 18.008.378
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 173.340.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 334.650.400
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 42.314.002.450
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 48.450.261.991
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegritas	Rp. 21.268.200
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 160.852.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp. 19.970.000
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Rp. 8.924.290.000
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Rp. 24.646.850
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp. 295.776.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 20.000.000
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 25.000.000
TOTAL		Rp. 158.435.474.266,66

ii. REKOMENDASI INSPEKTORAT

1. Melakukan revidi dan perbaikan pada dokumen perencanaan berupa penyesuaian seluruh dokumen perencanaan baik Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan maupun Perjanjian Kinerja untuk memastikan tujuan/sasaran telah bersifat outcome dan sesuai mandate sehingga tercrosscutting pada seluruh bidang-bidang dan unit kerja di Dinas Kesehatan. Kemudian, melakukan perbaikan pada penetapan target serta formulasi perhitungan target kinerja utama yang

- mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya dan telah memenuhi kriteria SMART;
2. Melakukan perbaikan pada pohon kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dengan cara memastikan pohon kinerja telah mempertimbangkan CSF yang menjadi area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dapat terbangun secara cukup;
 3. Melakukan identifikasi crosscutting kinerja sebagai bentuk sharing outcome dalam upaya mencapai sasaran strategis kinerja khususnya pada sasaran strategis kinerja yang memiliki nilai capaian sangat rendah pada sasaran IKS. Pada sasaran strategis ini memerlukan kontribusi dan dukungan dari bidang lainnya yang berkaitan agar capaian kinerja dapat tercapai secara optimal dan sesuai target;
 4. Memastikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dapat dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
 5. Melakukan pemantauan kinerja organisasi menggunakan system aplikasi secara rutin, contohnya dapat menggunakan google database studio atau system informasi lainnya;
 6. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga penetapan target kinerja kedepan lebih realistis dan menggambarkan upaya peningkatan kinerja;
 7. Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus;
 8. Memastikan informasi yang terdapat di dalam laporan kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan implementasi SAKIP di tahun selanjutnya serta dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga terjadi perbaikan nilai akuntabilitas dan kinerja pada Dinas Kesehatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan laporan kinerja ini

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	>100	Melampaui Target	Biru
2.	$\geq 91-100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
3.	75,1 – 90,0	Tinggi	Hijau Muda
4.	65,1 – 75,0	Sedang	Kuning Tua
5.	50,1 – 65,0	Rendah	Kuning Muda
6.	$\leq 50,0$	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010,

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Hasil capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 3.2
Hasil Pencapaian Indikator Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

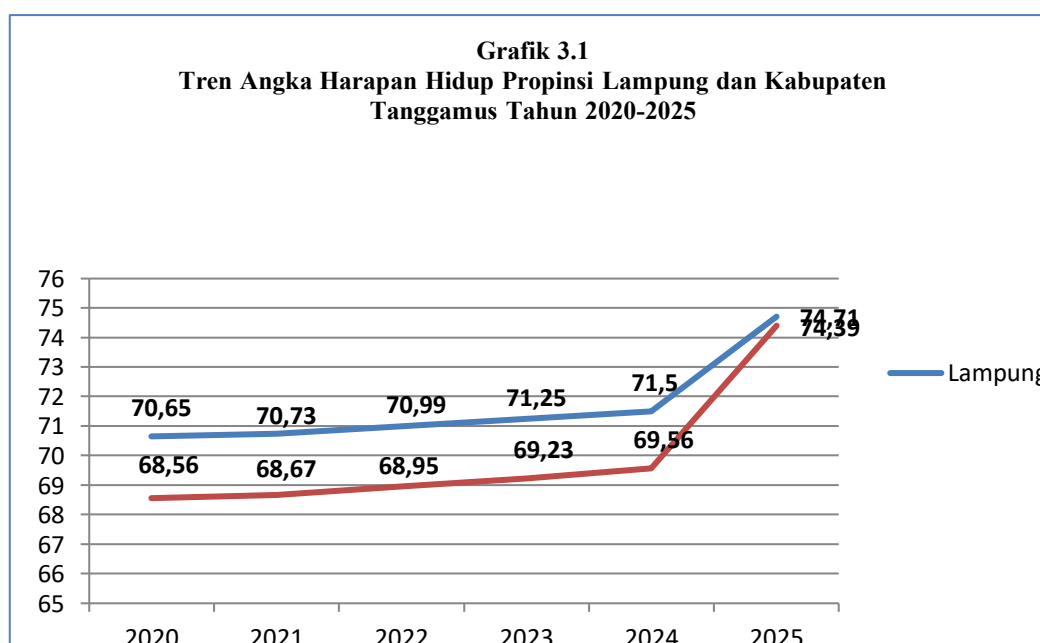
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	89.98	112,90	44.11%	Rendah
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	3.46	6.36	-80.51%	Sangat Rendah
		Prevalensi Balita Stunting	22,2	-	-	Tidak ada survey
		Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR)	59.94	67,02	111.81%	Melampau Target
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	94.41	95.00	100.63%	Melampau Target
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	98.40	98	99.58%	Sangat Tinggi
		Cakupan Kepesertaan JKN	80.2	78.8	98.28%	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	88.12	87.04	98.77%	Sangat Tinggi
		Rasio Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan per-satuan Penduduk	1.81	1.90	104.74%	Melampau Target

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja tersebut diatas, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, yang meliputi perbandingan hasil capaian kinerja, penjelasan dalam menghadapi permasalahan – permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya – upaya

yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya. Berikut kami sampaikan evaluasi dan analisis kinerja sebagai berikut :

Program pembangunan untuk urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2025 telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan **"Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat"** dengan Indikator tujuan **"Persentase Peningkatan Angka Harapan Hidup sebesar 0,2 %"**. Indikator Angka Harapan Hidup adalah salah satu keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan makin membaiknya tingkat kesehatan masyarakat. Tren pencapaian AHH di Kabupaten Tanggamus dibanding dengan capaian AHH Provinsi Lampung pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dapat lihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanggamus

Dari capaian yang terlihat pada grafik diatas maka target kenaikan angka harapan hidup dari Tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar 4,83 % dengan target yaitu 0,2 %. Angka Harapan Hidup berhubungan erat dengan Angka Kematian Balita (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Secara teoritis, menurunnya Angka Kematian Balita (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) akan menyebabkan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH). Akan tetapi pada

perhitungannya dibutuhkan Program pendukung lainnya yang dianggap berpengaruh terhadap angka kelahiran hidup disuatu daerah seperti Prevalensi Balita Stunting. Untuk itu Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dalam Renstra SKPD Dinas Kesehatan mencanangkan dua sasaran strategis yaitu :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya status kesehatan dan status gizi masyarakat

Pada sasaran strategis ini, dari 5 indikator yang ada, 2 indikator dalam kategori kinerja **Melampau Target**, 1 indikator dalam kategori kinerja **Rendah**, 1 indikator dalam kategori kinerja **Sangat Rendah** dan 1 indikator tidak ada survey, Analisis terhadap pencapaian untuk masing-masing indikator kinerja sasaran 1 seperti berikut :

a. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

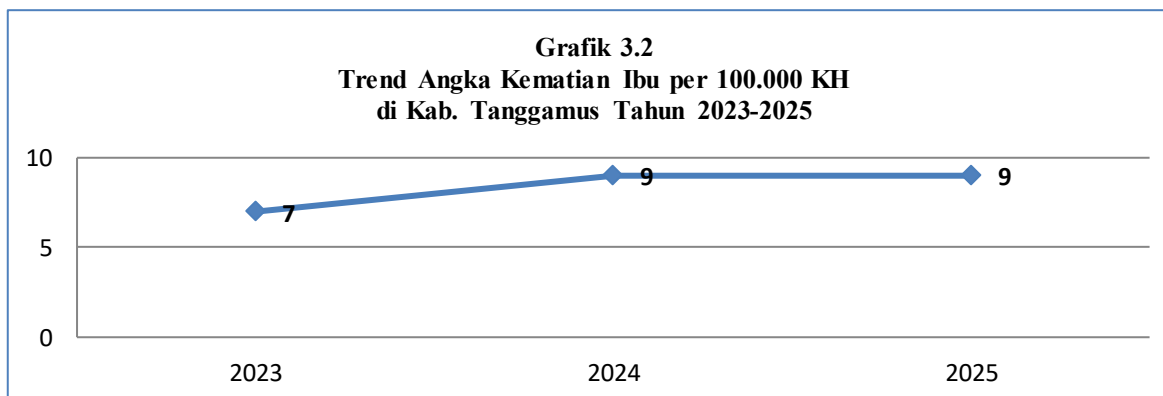
Tabel 3.3

Perbandingan Hasil Pencapaian Indikator Strategis (Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH) Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2024-2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	105	83.3	125%	81.92	112.90	44.11%

Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas, kecuali kasus kecelakaan. Angka kematian ibu di kabupaten Tanggamus tahun 2024 sebesar 83.3 per 100.000 kelahiran hidup. Pada Tahun 2025 jumlah kematian ibu 9 orang dengan jumlah kelahiran hidup 10.986 orang. Dibanding target (105 per 100.000 kelahiran hidup), Angka Kematian Ibu pada tahun 2025 di Kabupaten Tanggamus masih cukup baik. Namun jika dibanding dengan capaian nasional (185 per 100.000 Kelahiran Hidup), maka Kabupaten Tanggamus bisa dikatakan Sangat baik dalam penanganan AKI. Capaian yang baik ini meningkatkan angka kelahiran hidup untuk kabupaten Tanggamus. Untuk IKU dapat diartikan bahwa program-program yang telah dilaksanakan dalam upaya penurunan AKI tahun ini belum berhasil dan kinerjanya termasuk dalam kategori **Melampau Target**.

Perkembangan AKI di Kabupaten Tanggamus dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah sebagaimana grafik dibawah ini.



Sumber : Sub Koordinator Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus

Masih adanya kasus kematian pada ibu dikarenakan kurangnya minat ibu hamil untuk datang ke posyandu sehingga pengawasan dan pelayanan kesehatan pada ibu hamil kurang maksimal. Adapun penyebab kematian adalah perdarahan 44,4 %, hipertensi 33,3 %, Jantung 11,1 % dan lain-lain 11,1 %.

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu yaitu :

- Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil (*Ante Natal Care/ ANC* terpadu-10T) dengan minimal 6 kali kunjungan selama hamil dan wajib dilakukan pemeriksaan USG oleh dokter pada trimester pertama dan trimenster terakhir sebagai upaya deteksi dini komplikasi pada kehamilan;
- Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam APN (Peer Review Asuhan Persalinan Normal), kelas ibu dan penanganan kegawatdaruratan maternal
- Anjagsana dokter spesialis Obstetri dan Ginekology ke Puskesmas yang bertujuan memberi edukasi perawatan kesehatan bagi tenaga kesehatan, masyarakat dan keluarga sasaran serta mendekatkan akses pelayanan dokter spesialisik kebidanan ke masyarakat ;
- Pendampingan dokter spesialis Obstetri dan Ginekology dalam pelayanan ante natal care, kegawatdaruratan maternal dan rujukan kebidanan ke Puskesmas
- Pemanfaatan buku KIA bagi semua ibu, keluarga masyarakat dan tenaga kesehatan untuk memperoleh informasi dan memantau kesehatan ibu hamil;

- Optimalisasi dan Pemberdayaan Desa dengan P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) termasuk penempelan stiker P4K dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- Melakukan pengkajian *Audit Maternal Perinatal* (AMP) dan desiminasi hasil pengkajian pada kasus kematian ibu hamil, bersalin dan ibu nifas;
- Peningkatan integrasi program dengan pihak sekolah untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan remaja dan remaja putri yang mendapatkan tambah darah;

Permasalahan dalam penanganan AKI :

- Kompetensi yang kurang dalam penanganan kegawatdaruratan maternal sehingga perlu di lakukan refresing terus menerus pada tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal karena perkembangan ilmu tentang kegawatdaruratan selalu dinamis.
- Tim PONED yang sudah tidak lengkap sehingga perlu dibentuk tim PONED baru yang harus dilatih dengan ketentuan bahwa TIM PONED minimal bertugas 10 tahun pasca pelatihan

b. Angka Kematian Balita (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup

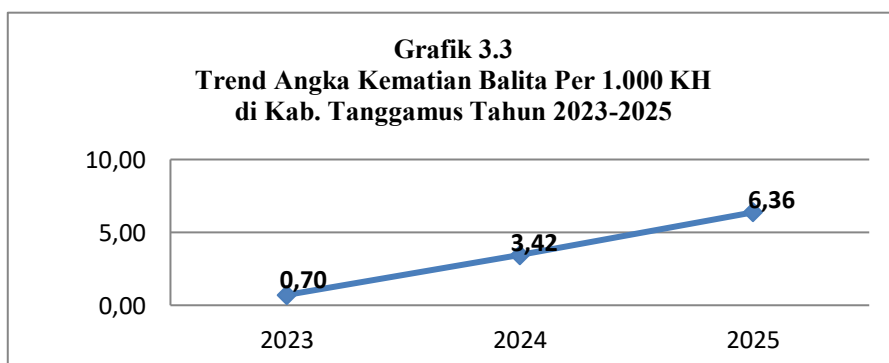
Tabel 3.4

Perbandingan Hasil Pencapaian Indikator Strategis (Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH) Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2024 – 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	3.8	3.42	110%	3.46	6,36	-80,51%

Kematian balita adalah kematian pada anak usia 0-11 bulan. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup di Tahun 2025 sebesar 6,36 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kelahiran hidup sebesar 10.986 orang dan kematian balita sebanyak 38 orang termasuk neonatal. Jika dibandingkan dengan target Renstra capaian tidak memenuhi target, dan jika

dibandingkan dengan target nasional 24 per 1.000 kelahiran hidup, maka capaian tidak baik dan kinerjanya masuk dalam kategori **Sangat Rendah**, Perkembangan angka kematian balita di Kabupaten Tanggamus dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :



Sumber : Sub Koordinator Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus

Terjadinya kenaikan pada capaian AKB dikarenakan pada Renstra Tahun 2018-2023 capaian Kematian balita adalah kematian pada anak usia 1-11 bulan sedangkan untuk Renstra Tahun 2025-2029 Kematian balita adalah kematian pada anak usia 0-59 bulan. Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus untuk menurunkan angka kematian balita adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil (*Ante Natal Care/ ANC* terpadu-10T) dengan minimal 6 kali kunjungan selama hamil dan wajib dilakukan pemeriksaan USG oleh dokter pada trimester pertama dan trimenster terakhir sebagai upaya deteksi dini komplikasi pada kehamilan;
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar, dimana setiap bayi baru lahir wajib dilakukan skrining Hipothyroid kongenital dan skrining Penyakit Jantung Bawaan Kritis dan dilakukan pelayanan kesehatan minimal 3 kali
- Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), manajemen penganganan asfiksia bayi baru lahir, dan penanganan kegawat daruratan bayi;
- Melaksanakan *skill assesment* pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan;
- Melakukan *Audit MaternalPerinatal* (AMP) pada kasus *near miss* dan atau kematian neonatal;

Permasalahan dalam penanganan AKB :

- Kompetensi yang kurang dalam penanganan kegawatdaruratan perinatal sehingga perlu dilakukan refresing terus menerus pada tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan perinatal karena perkembangan ilmu tentang kegawatdaruratan selalu dinamis.
- Tim PONED yang sudah tidak lengkap sehingga perlu dibentuk tim PONED baru yang harus dilatih dengan ketentuan bahwa TIM PONED minimal bertugas 10 tahun pasca pelatihan

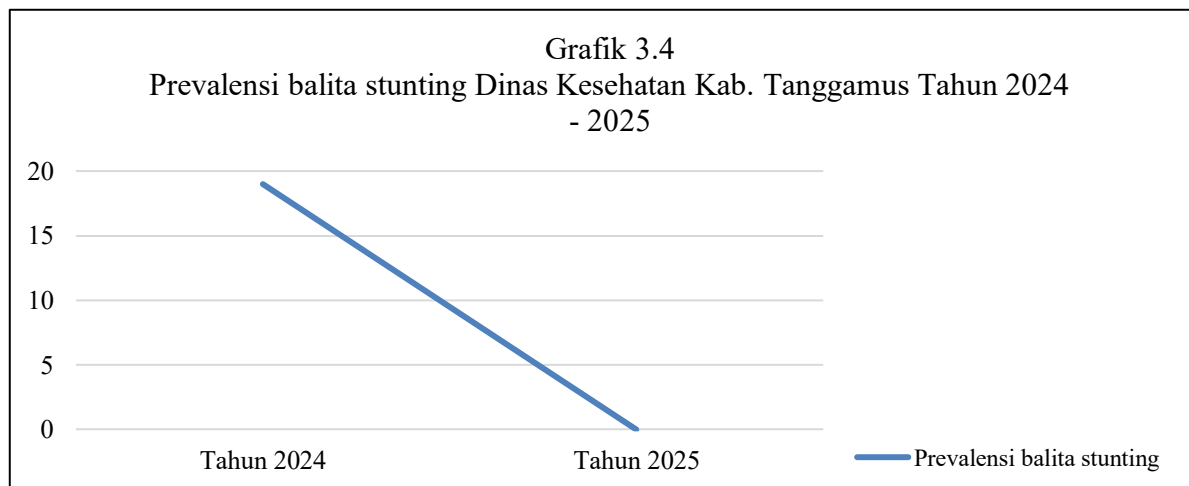
c. Prevalensi Balita Stunting

Tabel 3.5

Perbandingan Hasil Pencapaian Indikator Strategis (Prevalensi balita stunting) Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2024 - 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Prevalensi balita stunting	16	22,19	19,0	22,2	-	-

Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi ketidak cukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai anak usia 24 bulan. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Di Bawah 5 Tahun/Balita. Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk. Menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi stunting lebih dari 20 persen. Artinya, secara nasional masalah stunting di Indonesia tergolong kronis, terlebih lagi di 14 provinsi yang prevalensinya melebihi angka nasional. Untuk tahun 2024 prevalensi stunting Kabupaten Tanggamus berdasarkan data SSGI tahun 2024 adalah 19 %, Prevalensi balita stunting di Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 tidak ada survey.



Sumber : Sub Koordinator Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus untuk menurunkan angka prevalensi stunting adalah sebagai berikut :

- Pemeriksaan Ante natal care yang memenuhi standar yaitu minimal 6 kali dalam kehamilan dan wajib mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan
- Memberikan nutrisi tambahan berupa pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal, seperti makanan yang kaya protein hewani, lemak, dan kalori
- Memberikan suplemen, seperti vitamin A pada balita dan pemberian Tablet Tambah Darah pada remaja putri
- Menyarankan keluarga untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat
- Memperbaiki sanitasi dan penyediaan air bersih

Permasalahan dalam penanganan Stunting :

- Kurangnya akses ke makanan bergizi
- Kurangnya pengetahuan keluarga dan masyarakat tentang gizi seimbang
- Masalah sanitasi dan kesehatan lingkungan
- Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penurunan stunting

- Masalah dalam eksekusi program seperti tidak optimalnya program inovasi penurunan stunting di beberapa wilayah.
- Data rutin terkait gizi dan stunting belum terintegrasi
- Hasil input Eppgbm yang selalu dinamis

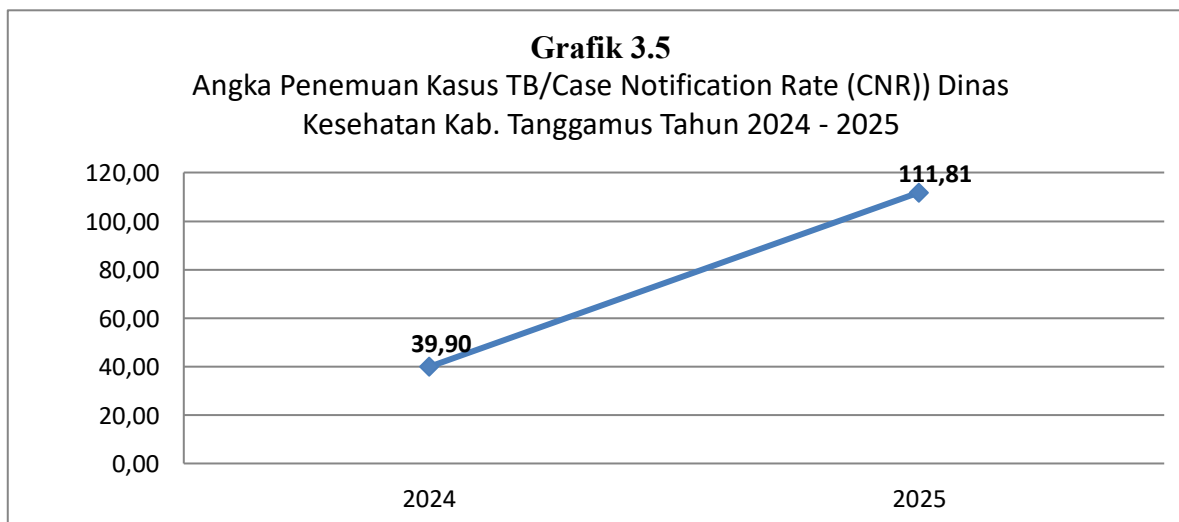
d. Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR)

Tabel 3.6

Perbandingan Hasil Pencapaian Indikator Strategis (Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR)) Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2024 – 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR)	385	153.6	39,9%	59,94	67.02	111.81 %

Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR) adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien TB yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk pada satu periode di suatu wilayah tertentu. Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR) di kabupaten Tanggamus tahun 2024 sebesar 153.5 per 100.000 Penduduk. Dibanding target (385 per 100.000 Penduduk), Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR) pada tahun 2025 di Kabupaten Tanggamus bisa dikatakan sudah maksimal dalam penanganan CNR dan kinerjanya termasuk dalam kategori *melaupau target*. Apabila dibandingkan dengan penemuan kasus TB 2025 angka penemuan atau CNR terjadi peningkatan yaitu 67.02/100.000 pddk dari target 59.94/100.000. Dari capaian penemuan kasus TB ini bila dibandingkan dengan target estimasi penemuan kasus TB tahun 2025 ini dimungkinkan sudah banyak penderita TB di wilayah kabupaten Tanggamus yang diketemukan dan diobati.



Sumber: Sub Koordinator Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dinas Kesehatan kabupaten Tanggamus

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus untuk Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR) adalah sebagai berikut :

- Membentuk SK TIM Percepatan Penanggulangan TB Kabupaten Tanggamus, Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pekon.
- Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi kesehatan dalam penemuan kasus TB
- Bekerjasama atau MOU dengan klinik dan praktek dokter swasta, untuk penjangkaran terduga TB dan dilakukan pemeriksaan dengan Tes cepat molekuler (TCM) untuk memastikan apakah tertular TB atau tidak.
- Melakukan Penemuakn Aktif / Aktif Cast Finding terhadap kellompok kelompok resiko, seperti sasaran kelompok kontak erat atau serumah dengan penderita, masyarakat kurang gizi, masyarakat dengan DM dan kelompok masyarakat dengan HIV.
- Melakukan screening TB di Lapas dan Rutan.
- Melakukan kegiatan screening kesehatan termasuk screening TB di sekolah.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua pelayanan di Puskesmas atau klinik dan dokter praktek swasta dalam penemuan kasus TB berdasarkan taget secara berkala.

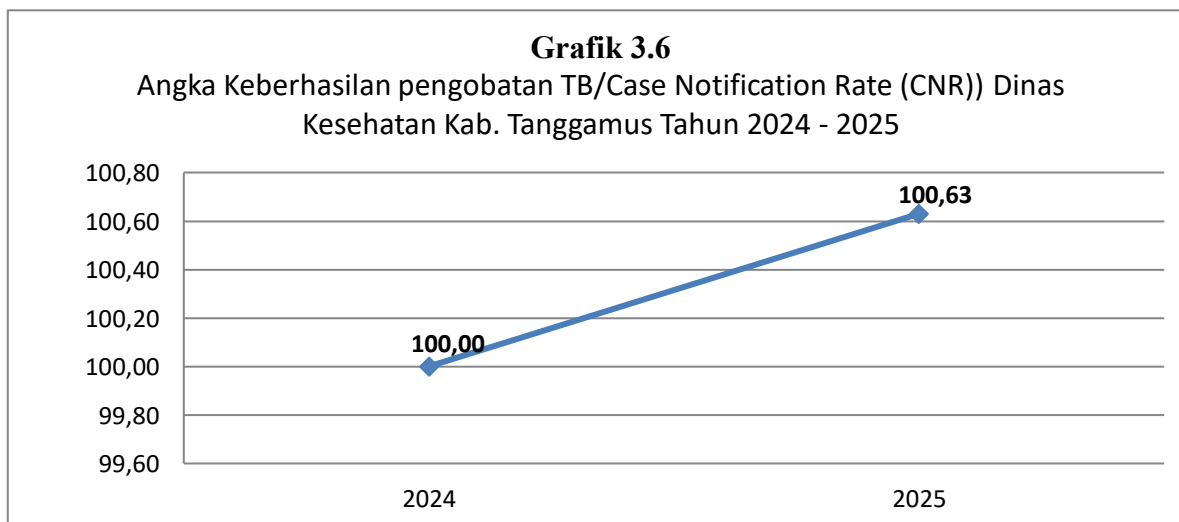
e. Angka Keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)

Tabel 3.7

Perbandingan Hasil Pencapaian Indikator Strategis (Angka Keberhasilan pengobatan TB/Case Notification Rate (CNR)) Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2024 - 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	94.3	94,3	100%	94.41	95	100,63%

Angka Keberhasilan pengobatan tuberculosi (treatment success rate) adalah angka yang menunjukkan jumlah pengobatan pasien TB yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk pada satu periode di suatu wilayah tertentu. Angka Keberhasilan pengobatan tuberculosi (treatment success rate) di kabupaten Tanggamus tahun 2024 sebesar 94.3 per 100.000 Penduduk. Sesuai dengan target (94.3 per 100.000 Penduduk), Angka Keberhasilan pengobatan tuberculosi (treatment success rate) pada tahun 2025 di Kabupaten Tanggamus bisa dikatakan sudah maksimal dalam pengobatan dan kinerjanya termasuk dalam kategori *melaupau target*. Apabila dibandingkan dengan Angka Keberhasilan pengobatan tuberculosi (treatment success rate) pada tahun 2024 terjadi peningkatan yaitu 95/100.000 pddk dari target 94.41/100.000. Dari capaian Keberhasilan pengobatan tuberculosi (treatment success rate) ini bila dibandingkan dengan target estimasi pengobatan tuberculosi (treatment success rate) tahun 2025 ini dimungkinkan sudah banyak penderita TB di wilayah kabupaten Tanggamus yang diketemukan dan diobati.



Sumber: Sub Koordinator Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dinas Kesehatan kabupaten Tanggamus

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus untuk Angka Keberhasilan pengobatan tuberculosis (treatment success rate) adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan dan penguatan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas sebagai pelaksana utama program TB.
- Pemantauan kepatuhan pengobatan pasien TB secara berkesinambungan, termasuk penunjukan dan penguatan peran Pengawas Menelan Obat (PMO) untuk mencegah putus berobat.
- Menjamin ketersediaan obat Anti Tuberkulosis (OAT) secara tepat jumlah dan waktu guna mendukung kelancaran dan keberhasilan pengobatan pasien.
- Pelaksanaan kegiatan promosi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat, guna meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan dan pengobatan TB serta mengurangi stigma terhadap penderita TB.
- Monitoring dan evaluasi capaian program TB secara berkala, baik di tingkat kabupaten maupun puskesmas, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan

Pada sasaran strategis ini, dari 4 indikator yang ada, sebanyak 1 indikator dalam kategori **Melampaui Target** dan 3 Indikator dalam kategori Sangat Tinggi. Analisis terhadap pencapaian untuk masing-masing indikator kinerja sasaran seperti berikut :

a. Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan

Tabel 3.8

Perbandingan Hasil Pencapaian Indikator Strategis (Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan) Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2024 – 2025.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan	98%	98,2%	100,2%	98.40	98	99.58%

Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2017 mengamanatkan agar Bupati dan walikota untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas di wilayah masing-masing serta lain hal sebagainya yang diatur dalam peraturan tersebut.

Pada tahun 2025 penduduk Tanggamus berjumlah 638.652 Jiwa sebanyak 98 % penduduk Kabupaten Tanggamus sudah memiliki Jaminan Kesehatan baik yang berasal dari Pemerintah, swasta maupun mandiri. Jaminan kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat miskin berasal dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diupayakan semuanya terintegrasi dalam BPJS.

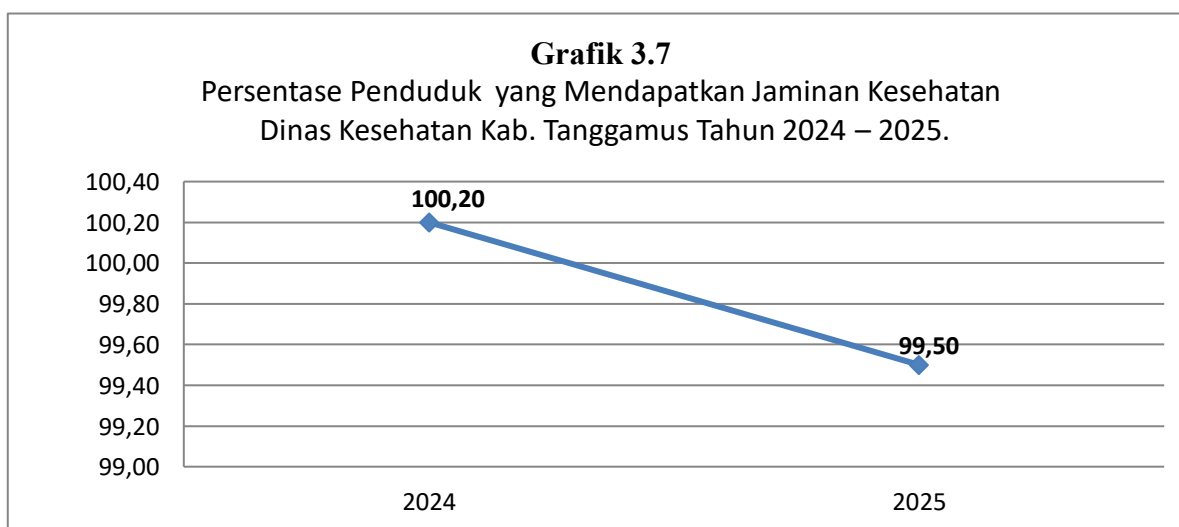
diupayakan semuanya terintegrasi dalam BPJS. Tahun 2025 peserta Jaminan Kesehatan masyarakat Tanggamus yaitu :

Peserta PBPU PEMDA : 175.597 jiwa

Peserta PBI JK : 355.272 jiwa

Peserta BP	: 6.087 jiwa
Peserta PBPU	: 33.791 jiwa
Peserta PPU BU	: 29.116 jiwa
Peserta PPU PN	: 30.728 jiwa

Total Kepesertaan Tahun 2025 630.591 jiwa dari 638.652 jiwa Hampir seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Tanggamus telah mendapat jaminan kesehatan sehingga capaian kinerja untuk indikator ini berada dalam kategori **Sangat Tinggi**.



Sumber : Substansi sub koordinator sumberdaya Kesehatan dan penjaminan kesehatan

Grafik 3.7 menunjukkan persentase penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2024–2025. Pada tahun 2024, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan tercatat sebesar **100,20%**, yang mengindikasikan bahwa seluruh penduduk bahkan telah terfasilitasi jaminan kesehatan secara menyeluruh. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan menjadi **99,50%**.

Penurunan sebesar **0,70 poin persentase** ini menunjukkan adanya sedikit penurunan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan. Meskipun demikian, secara umum cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Tanggamus masih tergolong **sangat tinggi dan hampir merata**, sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjamin. Kondisi ini perlu terus dipertahankan melalui pemutakhiran data kepesertaan, peningkatan sosialisasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar seluruh penduduk tetap terlindungi oleh program jaminan kesehatan.

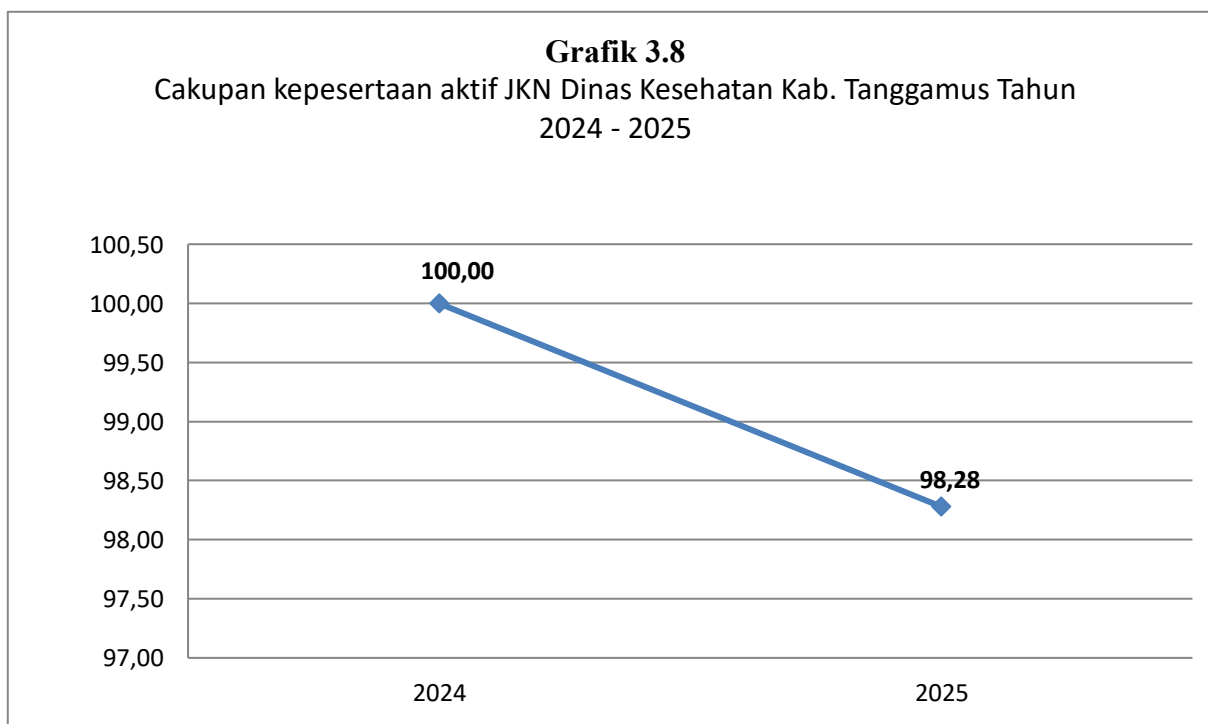
b. Cakupan kepesertaan aktif JKN

Tabel 3.9
Perbandingan Hasil Pencapaian Indikator Strategis (Cakupan kepesertaan aktif JKN) Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2024 - 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Cakupan Kepesertaan Aktif JKN	63.09	63.09	100 %	80.2	78.8	98.28%

angka capaian kepesertaan aktif JKN mencapai 98,28%, dengan target sebesar 80,2% dan realisasi sebesar 78,8%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja program berada pada kategori **sangat tinggi**, meskipun realisasi kepesertaan aktif masih belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perubahan status kepesertaan peserta mandiri akibat ketidakpatuhan pembayaran iuran, serta dinamika pemutakhiran data kepesertaan.

Dalam rangka meningkatkan realisasi capaian, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus telah melakukan koordinasi intensif dengan BPJS Kesehatan dan perangkat daerah terkait, melakukan pemutakhiran dan validasi data kepesertaan, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif. Upaya tersebut akan terus ditingkatkan guna mendorong optimalisasi kepesertaan aktif JKN serta mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Tanggamus.



Sumber : Substansi sub koordinator sumberdaya Kesehatan dan penjaminan kesehatan

Grafik 3.8 menunjukkan cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2024–2025. Pada tahun 2024, persentase kepesertaan aktif JKN mencapai **100,00%** dari jumlah penduduk 670,367 jiwa yang berarti seluruh penduduk terdaftar sebagai peserta aktif JKN. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan cakupan kepesertaan aktif menjadi **98,28%** dari jumlah penduduk 638.652 jiwa. Penurunan sebesar **1,72 poin persentase** ini mengindikasikan adanya sebagian peserta yang status kepesertaannya menjadi tidak aktif, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tunggakan iuran, perubahan status kepesertaan, atau pemutakhiran data kependudukan. Meskipun mengalami penurunan, cakupan kepesertaan aktif JKN di Kabupaten Tanggamus masih tergolong **sangat tinggi**, sehingga secara umum akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui JKN tetap terjaga. Ke depan, diperlukan upaya penguatan monitoring kepesertaan aktif, sosialisasi kewajiban iuran, serta pemutakhiran data secara berkala agar cakupan kepesertaan aktif JKN dapat kembali optimal.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan

Tabel 3.10

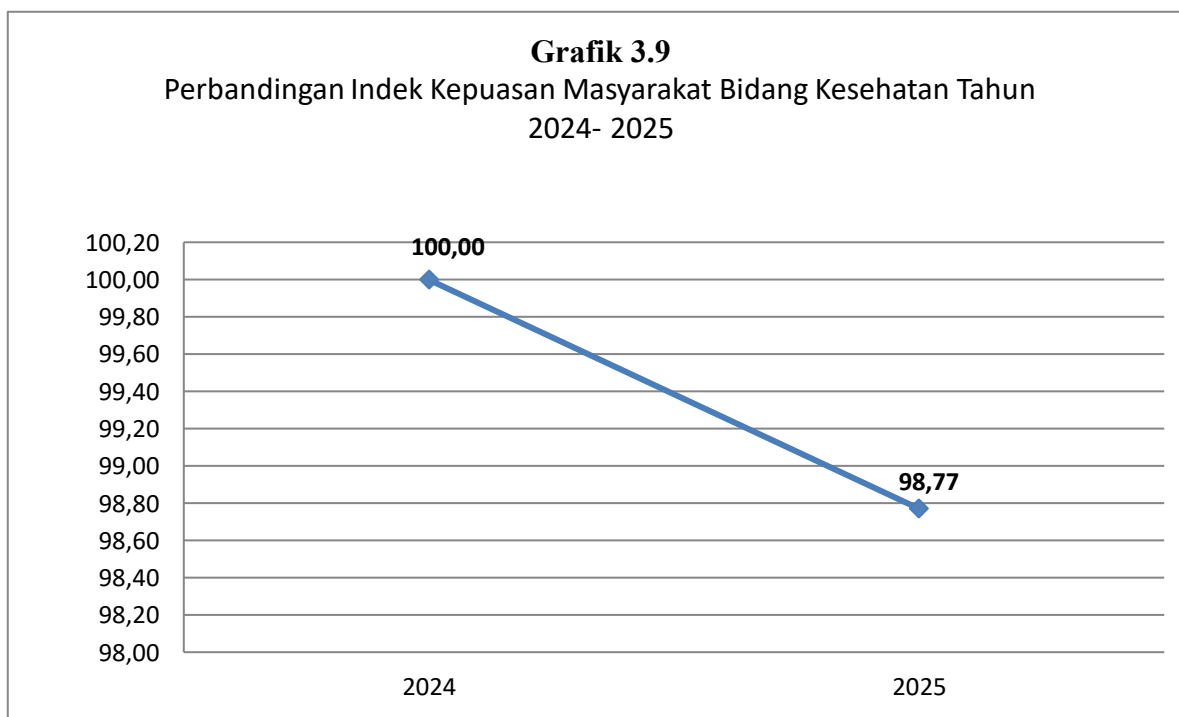
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2024- 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	88,29	88,29	100 %	88.12	87.04	98.77%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Sasaran Strategis “**Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan**”, dengan Indikator Kinerja Utama berupa **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan**, diperoleh capaian sebagai berikut:

Pada Tahun 2024, target IKM yang ditetapkan sebesar 88,29, dan realisasi yang diperoleh juga sebesar 88,29, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan telah memenuhi ekspektasi dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut mencerminkan konsistensi dalam penerapan standar pelayanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan, serta penguatan sistem pengaduan dan tindak lanjut keluhan masyarakat. Dengan capaian maksimal ini, dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan mutu pelayanan pada tahun 2024 berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap persepsi serta kepuasan masyarakat.

Selanjutnya pada Tahun 2025, target IKM ditetapkan sebesar 88,12, dengan realisasi sebesar 87,04, sehingga capaian kinerja mencapai 98,77%. Meskipun belum mencapai target secara penuh, selisih sebesar 1,08 poin dari target menunjukkan bahwa kinerja pelayanan tetap berada pada kategori **sangat tinggi**. Penurunan capaian yang relatif kecil ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan, dinamika jumlah kunjungan pasien, maupun adanya kendala teknis dalam pelaksanaan pelayanan.



Sumber : sub bagian pegawai dan umum Dinas Kesehatan Tanggamus

Secara umum, tren capaian IKM selama dua tahun tersebut menunjukkan bahwa mutu pelayanan kesehatan tetap terjaga pada tingkat yang tinggi. Perbedaan capaian pada tahun 2025 menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan berkelanjutan (continuous improvement), antara lain melalui penguatan budaya pelayanan prima, peningkatan responsivitas terhadap pengaduan, pemenuhan standar waktu pelayanan, serta peningkatan kompetensi dan etika pelayanan petugas kesehatan.

Dengan demikian, kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan dalam mendukung sasaran strategis peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dapat dinilai **sangat baik**, serta menjadi dasar untuk penyempurnaan kebijakan dan program pada periode berikutnya guna mencapai target secara optimal.

d. Rasio Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan per- satuan Penduduk

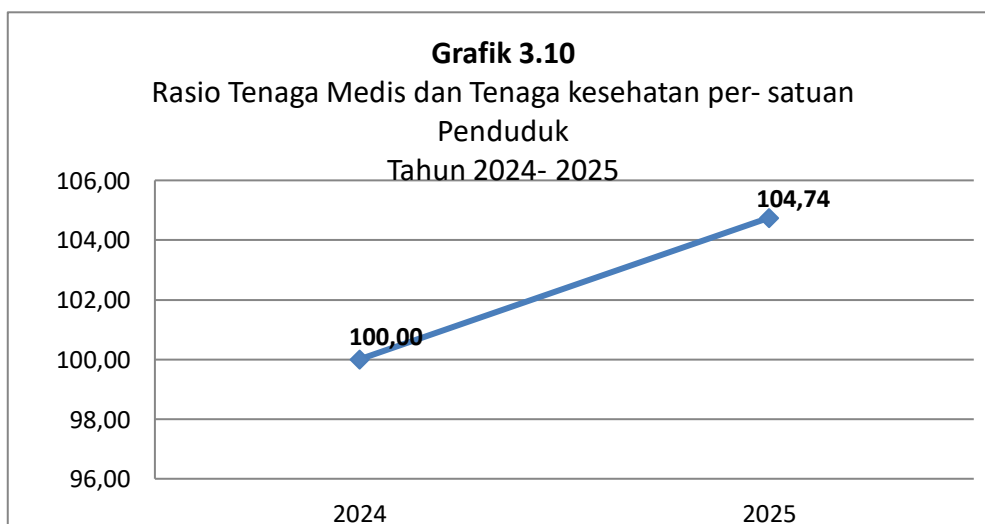
Tabel 3.11
Perbandingan Rasio Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan per- satuan Penduduk
Tahun 2024- 2025

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARG ET	REALI SASI	CAPAI AN	TARG ET	REALI SASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan per-satuan Penduduk	1,80	1,80	100 %	1.81	1.90	104.74%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan”, dengan Indikator Kinerja Utama berupa Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk, diperoleh capaian sebagai berikut:

Pada Tahun 2024, target rasio yang ditetapkan sebesar 1,80, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 1,80, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan telah sesuai dengan perencanaan kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk. Pemenuhan rasio ini mencerminkan keberhasilan dalam perencanaan distribusi SDM kesehatan, optimalisasi penempatan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, serta koordinasi yang baik dalam pengelolaan kebutuhan tenaga kesehatan di wilayah kerja.

Selanjutnya pada Tahun 2025, target rasio ditetapkan sebesar 1,81, dengan realisasi sebesar 1,90, sehingga capaian kinerja mencapai 104,74%. Capaian yang melebihi target ini menunjukkan adanya peningkatan ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan dibandingkan dengan yang direncanakan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya penambahan formasi tenaga kesehatan, pengangkatan tenaga baru, redistribusi tenaga antar fasilitas pelayanan kesehatan, maupun peningkatan jumlah tenaga kontrak atau penugasan khusus.



Sumber : Substansi sub koordinator sumberdaya Kesehatan dan penjaminan Kesehatan

Secara umum, capaian rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan selama dua tahun tersebut menunjukkan tren positif dalam upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan, percepatan waktu pelayanan, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Dengan demikian, indikator Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk dalam mendukung sasaran strategis peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dapat dinilai sangat baik dan indikator **melaupau target**, bahkan menunjukkan peningkatan kinerja pada Tahun 2025 yang melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menjadi landasan penting untuk mempertahankan dan mengoptimalkan distribusi tenaga kesehatan secara merata dan berkelanjutan di masa mendatang.



Table 3.12

Data Tenaga Kesehatan pada puskesmas dikabupaten Tanggamus

No	Nama Faskes	Jenis Faskes	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Apoteker	Asisten Apoteker	Analisis Lab	Gizi	Kesling	Kesmas	Nakes Lainnya
1	SUMBEREJO	Non Rawat Inap	1	0	8	19	1	1	1	1	1	2	0
2	GUNUNG SARI	Rawat Inap	1	0	3	17	1	0		1	1	2	0
3	SIRING BETIK	Rawat Inap	2	0	13	27	1	2	3	2	1	0	3
4	WONOSOBO	Non Rawat Inap	1	0	10	26	1	1	1	2	1	0	0
5	SUDIMORO	Non Rawat Inap	1	0	13	18	1	0	1	1	2	0	1
6	SUKARAJA	Rawat Inap	1	0	15	23	0	2	2	2	1	2	2
7	SANGGI	Rawat Inap	2	0	11	25	1	0	0	1	1	0	0
8	KOTA AGUNG	Non Rawat Inap	1	0	13	28	2	0	2	1	1	0	0
9	WAY NIPAH	Rawat Inap	1	0	12	20	0	1	1	2	1	0	0
10	PASAR SEMPANG	Non Rawat Inap	2	0	7	22	1	2	1	0	1	2	2
11	NEGARA BATIN	Non Rawat Inap	2	0	11	19	1	0	1	1	1	1	1
12	PULAU PANGGUNG	Rawat Inap	2	1	18	39	1	0	1	1	1	0	0
13	NGARIP	Rawat Inap	1	1	13	24	0	1	1	1	1	1	0



14	AIR NANINGAN	Rawat Inap	3	0	22	38	2	0	1	2	3	0	14
15	TALANG PADANG	Rawat Inap	4	0	21	45	1	3	1	2	0	1	2
16	MARGOYOSO	Rawat Inap	1	0	13	27	1	0	1	2	1	1	2
17	GISTING	Rawat Inap	3	1	18	43	1	2	2	2	1	1	0
18	KEDALOMAN	Non Rawat Inap	2	0	12	35	1	1	1	2	1	1	0
19	RANTAU TIJANG	Rawat Inap	2	0	15	26	1	3	1	1	2	3	0
20	SUMANDA	Rawat Inap	1	0	14	30	1	1	1	1	2	1	1
21	BULOK SUKAMARA	Rawat Inap	2	0	22	26	1	0	1	1	2	2	11
22	PUTIH DOH	Rawat Inap	1	0	19	24	0	1	1	2	0	0	0
23	KLUMBAYAN	Rawat Inap	2	0	15	16	0	0	0	1	0	0	0
24	ANTAR BRAK	Rawat Inap	2	0	16	19	0	1	0	1	2	1	14
25	KLUMBAYAN BARAT	Rawat Inap	3	0	11	18	0		0	0	3	0	0
26	MARTANDA	Rawat Inap	2	0	4	7	0	2	1	1	1	1	0
Total			46	3	349	661	20	24	26	34	32	22	53



Table 3.13

Data Tenaga Kesehatan pada Rumah sakit Batin Mangunang

No	Nama Faskes	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Perawat	Bidan	farmasi	Medis	Gizi	Kesling	Keterapian fisik	Keteknisian medis	Teknik Biomedika
1	Rumah Sakit Batin Mangunang	21	1	15	113	37	9	37	2	4	4	7	19

berdasarkan tabel sebaran tenaga kesehatan di Kabupaten Tanggamus, terlihat bahwa jumlah dan jenis tenaga kesehatan tersebar di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, baik di puskesmas, dan rumah sakit. Sebaran ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Tanggamus.

Secara umum, tenaga kesehatan yang paling banyak jumlahnya adalah perawat dan bidan, yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dasar, terutama di puskesmas dan wilayah pedesaan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan layanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan promotif dan preventif di tingkat pertama. Sementara itu, jumlah dokter dan dokter gigi masih relatif lebih sedikit dibandingkan tenaga kesehatan lainnya, sehingga diperlukan pengaturan penempatan yang merata agar akses pelayanan medis dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Selain itu, keberadaan tenaga kesehatan lainnya seperti apoteker, tenaga farmasi, analis laboratorium, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan turut mendukung kelengkapan layanan kesehatan. Namun, pada beberapa wilayah tertentu, sebaran tenaga kesehatan belum merata, terutama di daerah terpencil atau sulit dijangkau, yang berpotensi memengaruhi kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Dengan demikian, tabel sebaran tenaga kesehatan ini dapat menjadi dasar bagi perencanaan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di Kabupaten Tanggamus ke depan, agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh wilayah.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan kinerja tahun 2025, faktor pengelolaan manajemen kinerja sangat diperlukan. Hal ini menjadi sistem yang dilakukan untuk mengarahkan sumber daya yang ada menuju kepada pencapaian tujuan secara efektif. Efektivitas dan efisiensi merupakan arah yang akan diraih dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pencapaian hasil kinerja yang telah diperoleh merupakan sarana untuk melakukan evaluasi dan penilaian kepada seluruh komponen di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.

3.2.1. ALOKASI PER SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Tabel 3.14

Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tanggamus Tahun 2025

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	
			Rp.	%
1	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	1.713.507.650	2,20 %
		Angka Kematian Balita (AKB) per 1.000 KH	19.860.916.070	25,44 %
		Prevalensi Balita Stunting	1.938.153.780	2,48 %
		Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR)	74.990.000	0,10 %
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	0	0
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	45.282.366.841	58,01 %
		Cakupan Kepesertaan JKN	0	0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	223.319.200	0,29 %
		Rasio Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan per- satuan Penduduk	8.968.906..850	11,49 %

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat beberapa urusan yang menjadi prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. Berikut urutan prioritas paling atas apabila dilihat dari pembagian alokasi anggaran persasaran :

- 1) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (2.20 %)
- 2) Angka Kematian Balita (AKB) per 1.000 KH (25.44 %)
- 3) Prevalensi balita stunting (2.48 %)
- 4) Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR) (0,10 %)
- 5) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)
- 6) Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan (58.01%)
- 7) Cakupan Kepesertaan JKN



- 8) Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan (0.29 %)
- 9) Rasio Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan per- satuan Penduduk (11.49 %)



3.2.2 PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Pencapaian kinerja dibandingkan anggaran yang tersedia selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Kinerja dibandingkan dengan anggaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	
1	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	89.98	112,90	44.11%	1.713.507.650	1.171.620.380	68,4 %	24,29 %
		Angka Kematian Balita (AKB) per 1.000 KH	3.46	6.36	-80.51%	19.860.916.070	19.234.041.043	96,8 %	16,29 %
		Prevalensi Balita Stunting	22.2	-	-	1.938.153.780	1.862.323.856	96 %	-98 %
		Angka Penemuan Kasus TB/Case Notification Rate (CNR)	59.94	67,02	111.81%	74.990.000	47.871.200	63,8 %	-48,01 %
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	94.41	95.00	100.63%	-	-	-	-
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	98.40	98	99.58%	45.282. 366.841	45.282. 366.841	100 %	0.42 %
		Cakupan Kepesertaan JKN	80.2	78.8	98.28%	0	-	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	88.12	87.04	98.77%	223.319.200	113.122.837	50,6 %	-48,17%
		Rasio Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan per- satuan Penduduk	1.81	1.90	104.74%	8.968.906.850	8.899.773,326	99,2 %	-5,54 %



Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaan kinerja tahun anggaran 2025, didukung oleh ketersediaan anggaran yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan tahun anggaran 2025. Alokasi anggaran ini dibedakan atas 2 jenis belanja yaitu : belanja operasi dan belanja modal. Jumlah anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 158.435.474.266,66

BAB IV PENUTUP

4.1. PENGUKURAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2029, sasaran strategis yang telah disusun diimplementasikan dalam bentuk 5 program yang dijabarkan dalam 18 kegiatan. Kegiatan yang dimaksud terdiri dari kegiatan yang bersifat teknis pengawasan dan kegiatan yang menyangkut pelayanan yang mendukung pencapaian sasaran dan kebijakan. Keberhasilan kinerja dilihat dari hasil pengukuran atau penilaian tingkat kinerja yang dicapai tahun 2025 dengan rencana dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam pencapaian ukuran kinerja, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2025 dari 9 indikator kinerja utama yang melebihi atau melampaui target sebanyak 3 indikator, 3 indikator dengan kategori sangat tinggi, 1 indikator dengan kategori rendah dan 1 indikator dengan kategori sangat rendah. Sedangkan 1 indikator tidak dapat diukur karena pada tahun 2025 tidak ada survey.

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 dapat dikategorikan berhasil untuk pelaksanaan Belanja Langsung yang terdiri dari 5 (Lima) Program yang diuraikan dalam 18 (Delapan Belas) kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 131.990.261.232,66 Atau 83,31 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 158.435.474.266,66

4.2 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan kesehatan yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan.

Di masa mendatang, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator sasaran yang telah disepakati dalam Rencana Strategis 2025-2029, sesuai dengan tahapan target pencapaian per tahun, maka pada tahun 2025 seluruh indikator sasaran sudah dapat diidentifikasi perkembangan capaiannya, meskipun disadari masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya. Hal ini akan menjadi strategi untuk diselesaikan pemecahannya pada tahun berikutnya

4.3 REKOMENDASI

Guna mempertahankan dan memperbaiki pencapaian kinerja, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus sangat mengharapkan adanya peningkatan kerja sama berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas dalam bentuk :

1. Partisipasi stakeholders, antara lain : SKPD terkait, pemerintah Propinsi dan Pusat, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Tanggamus.
2. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar bidang dan seksi di lingkungan Dinas Kesehatan dalam rangka mewujudkan kinerja yang lebih baik.